

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA, UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN KENEGARAAN

A. Sudiharto DJIWANDONO

PENDAHULUAN

Menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-37, Presiden Soeharto telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tertanggal 11 Agustus 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda.

Untuk mencoba mengerti tentang makna Instruksi Presiden tersebut kiranya perlu dilihat dalam kaitannya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di mana antara lain ditetapkan: "Pendidikan politik rakyat ditingkatkan, agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan."

Dari sini kita melihat bahwa MPR melalui GBHN memang mengamanatkan perlunya diusahakan peningkatan pendidikan politik rakyat yang pada hakikatnya tidak lain ialah makin meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan dengan meningkatnya kesadaran tersebut dapat diharapkan makin meningkatnya pula keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, sesuatu yang bagi suatu negara demokrasi merupakan hal yang mutlak.

Di samping itu Republik Indonesia adalah juga negara yang sedang membangun dan akan terus membangun karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan tidak mengenal titik akhir. Dalam usaha pembangunan ini pun keikutsertaan rakyat adalah mutlak, karena akan merupakan suatu paradoks apabila pembangunan nasional yang hakikatnya adalah mem-

bangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat itu tidak melibatkan rakyat sebagai obyek dan sekaligus subyek pembangunan.

Dalam hubungan ini kiranya perlu ditekankan bahwa baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam usaha dan kegiatan pembangunan nasional kita berpijak pada nilai-nilai dasar budaya bangsa yang menjadi landasan filsafati negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Oleh karenanya pendidikan politik rakyat, dan dengan demikian juga pendidikan politik bagi generasi muda, pada hakikatnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran rakyat sebagai warga negara akan nilai-nilai dasar, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Dan dengan kesadaran tersebut diharapkan partisipasi aktif dan positif dari seluruh warga negara dalam kehidupan kenegaraan dan dalam usaha-usaha pembangunan nasional yang berjalan terus dan makin meningkat.

Partisipasi rakyat memang merupakan tuntutan dari sistem demokrasi. Ia merupakan sesuatu yang penting dan esensial karena demokrasi tanpa partisipasi rakyat bukanlah demokrasi yang sebenarnya. Namun partisipasi ini haruslah suatu partisipasi yang tumbuh karena kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, yang dilandasi oleh penghayatan akan nilai-nilai luhur yang mendasari dan menjiwai sistem yang berlaku.

Di lain pihak kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran pada umumnya berjalan sejajar dengan peningkatan kecerdasan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kecerdasan bangsa merupakan salah satu amanat kemerdekaan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Usaha pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sekarang ini sedang berjalan dan ditangani secara sungguh-sungguh adalah dalam kaitan ini, sehingga setiap orang sekurang-kurangnya dapat memperoleh pendidikan tingkat dasar yang akan membuka kemungkinan bagi pengembangan pribadi selanjutnya.

Dengan meningkatnya kecerdasan rakyat dengan demikian juga bisa diharapkan bahwa pendidikan politik akan menjadi semakin efektif.

PENDIDIKAN POLITIK DAN PROSES SOSIALISASI

Pada umumnya diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan baik kaum muda maupun kaum tua ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pen-

didikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef dalam berbagai kesempatan, jauh lebih luas dari hasil lembaga persekolahan, mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri.

Dan bagi kita bangsa Indonesia, di mana pendidikan nasional kita tidak bisa lain kecuali harus berdasarkan Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mempunyai jangkauan yang luas dan dalam, tidak hanya kecerdasan tetapi praktis seluruh potensi manusia-manusia Indonesia seutuhnya.¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik rakyat sebenarnya sudah berjalan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Karena pendidikan dalam arti luas terlaksana melalui jalur formal dan jalur-jalur lain di luar jalur formal, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mensosialisasikan rakyat ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana salah satu aspeknya adalah kehidupan kenegaraan.

Dengan perkataan lain penanaman dan pengembangan kesadaran warga negara dalam bernegara bangsa telah berjalan melalui interaksi kemasyarakatan, suatu proses yang dikenal sebagai proses sosialisasi.

Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman kesadaran ini dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non-formal dan informal proses itu berjalan melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya.

Kalau demikian tentu bisa timbul pertanyaan, apakah masih diperlukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 seperti disebut dalam awal tulisan ini. Pertanyaan lain yang juga timbul adalah berkenaan dengan istilah pendidikan politik itu sendiri yang oleh sebagian anggota masyarakat dikuatirkan akan justru "memancing" masyarakat khususnya generasi muda untuk bersikap dan bertingkah laku politik, dalam arti politik praktis, yang dalam pengalaman di masa lalu telah menimbulkan berbagai eksek dalam kehidupan politik dan kenegaraan kita.

Dalam hal ini, apabila kita mulai dengan permasalahan yang kedua, kiranya perlu diingat bahwa istilah pendidikan politik rakyat memang secara for-

¹Dari pidato pengarahannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut Negeri dan Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seluruh Indonesia, Jakarta, 2 Maret 1981.

mal dipergunakan di dalam perumusan GBHN, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 (lihat kutipan di muka).

Pemakaian istilah itu di dalam perumusan GBHN tentu tidak dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Adalah suatu kenyataan bahwa istilah "politik" sering kali disalahartikan atau disalahmengertikan dalam masyarakat, tidak saja di Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi ternyata juga di masyarakat negara-negara maju. Seperti dikatakan oleh Willem Langeveld, perkataan "politik" memberikan pengaruh yang buruk, yang meracuni, karena politik adalah kegiatan yang kotor (bandingkan ungkapan dalam bahasa Belanda yang masih diingat oleh "generasi tua" kita: "politiek is vies"). Politik adalah sinonim dengan pertentangan (conflict), begitu pula politik sering kali diidentikkan dengan partai-partai politik, suatu kekeliruan pengertian yang dapat dimengerti.

Itulah alasannya mengapa sosialisasi politik yang dilakukan di jalur pendidikan formal tidak dilakukan secara terbuka tetapi dengan berbagai cara secara terselubung atau apa yang disebut sebagai "hidden curriculum." Kecuali di Republik Federasi Jerman di mana istilah "pendidikan politik" secara umum diterima, di negara-negara lain pendidikan politik di sekolah-sekolah diberikan melalui mata-mata pelajaran dengan nama atau sebutan yang berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Di Amerika Serikat disebut dengan "social studies" yang isinya merupakan kombinasi antara sejarah, geografi, civics dan ekonomi, di Inggris disebut "civics", "social education" dan "social science education." Sementara itu di Perancis dan di Italia dipakai istilah "law" atau "philosophy".¹

Di bidang pendidikan formal di Indonesia keadaan yang sama juga kita jumpai. Kita pernah mengenal mata pelajaran civics atau kewargaan negara berdasarkan Kurikulum 1968 yang berlaku di lembaga-lembaga persekolahan kita, yang pada hakikatnya adalah juga suatu sosialisasi politik melalui jalur pendidikan formal. Demikian pula dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975 yang sekarang masih berlaku, yang dari satu segi dapat dipandang sebagai suatu "hidden curriculum" dari upaya untuk mensosialisasikan anak didik ke dalam nilai-nilai moral Pancasila, sehingga penghayatan atau pemilikan anak didik terhadap nilai-nilai tersebut meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan perkataan lain kita menginginkan agar anak didik berkembang menjadi warga

¹Lihat Willem Langeveld: "Political Education as a Principle, Problems, Examples and Ideas," *Korea & World Affairs*, Vol. 4/4, Winter 1980, p. 626.

negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut. Dan dengan demikian esensinya adalah "pendidikan politik" yang dalam hal ini dilakukan melalui jalur pendidikan formal.

Apakah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda akan memberikan dampak perubahan terhadap istilah yang dipergunakan, kiranya tergantung dari pertimbangan dan pemikiran para ahli khususnya dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin juga perubahan itu dipandang tidak perlu dilakukan apabila diingat bahwa pendidikan politik bagi generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden diarahkan dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam konsiderans instruksi tersebut. Yang mungkin diperlukan adalah penyesuaian isi, khususnya yang bersangkutan dengan aspek kehidupan politik dan kenegaraan sehingga menjadi lebih nyata dan terarah.

Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempergunakan istilah "pendidikan politik" di dalam ketetapanannya mengisyaratkan adanya suatu upaya guna lebih memasyarakatkan istilah "politik" tersebut agar makin lama persepsi yang keliru tentang politik yang masih melekat pada sebagian anggota masyarakat makin menipis. Pandangan bahwa politik adalah pekerjaan yang kotor, yang mengandung racun, yang penuh dengan pertentangan dan praktek-praktek yang tidak terpuji atau sebutan-sebutan lain yang mengungkapkan suatu pandangan yang selalu negatif terhadap segala sesuatu yang berbau politik, seharusnya diluruskan sehingga timbul suatu pengertian yang semestinya tentang politik dan dengan demikian juga sikap yang wajar terhadap politik.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik memang bisa dimengerti lebih-lebih di masyarakat berkembang di mana taraf kecerdasan rakyat umumnya masih relatif rendah. Bagi masyarakat kita kekaburan ini menjadi semakin besar karena pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula di masyarakat.

Ini berarti bahwa aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi masyarakat tentang politik. Realita memang kadang-kadang atau bahkan sering kali tidak sesuai dengan idealnya, meskipun kita tahu bahwa itu bukan yang seharusnya. Realita dalam kehidupan politik sering kali menyimpang dari sistem politik ideal yang hendak kita bangun, kita laksanakan dan kita kembangkan, yang bagi kita tidak lain adalah sistem politik yang berdasarkan Pancasila.

Penyimpangan ini bisa disebabkan karena sistem politik ideal yang hendak kita kembangkan itu belum memasyarakat secara luas sehingga bagi sebagian masyarakat termasuk mereka yang secara langsung terjun dalam kancah perjuangan politik, masih merupakan sesuatu yang kabur, yang belum jelas, sehingga dengan sendirinya juga terjadi kekaburan dalam praktek hidup berpolitik.

Penyimpangan juga bisa terjadi karena para pelaku politik tidak secara teguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam mengejar "kemenangan" politiknya.

Di sinilah kita melihat betapa perlunya mensosialisasikan masyarakat, baik generasi muda maupun kaum tua ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, di mana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal, upaya itu kita sebut sebagai pendidikan politik.

Oleh karena nilai-nilai dan norma-norma yang disosialisasikan itu adalah nilai-nilai dan norma-norma dasar yang vital, dalam mana kita hidup dan mengatur kehidupan ini, maka apa yang ingin kita sampaikan melalui pendidikan politik itu tidak lain adalah suatu konsep budaya bangsa, yang dalam hal ini lebih dititikberatkan pada budaya politik yang merupakan sub-sistem dari sistem budaya bangsa.

Budaya politik ini mencakup baik cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik (polity) yang berlaku. Bagi kita sudah jelas bahwa sumber dari budaya politik ini adalah Pancasila sebagai landasan idiilnya dan UUD 1945 sebagai landasan strukturalnya.

Oleh karena itu sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982, pendidikan politik bagi generasi muda perlu diberikan dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus-menerus memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup bernegara dan kenegaraan. Dengan perkataan lain pendidikan politik terarah kepada makin diresapinya dan dihayatinya budaya politik Pancasila, sehingga sistem politik ideal, yaitu sistem politik Pancasila yang merupakan cita-cita politik kita menjadi semakin mantap dalam praktek hidup kenegaraan.

Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Dr. Alfian kiranya tepat, ialah bahwa: "Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang di-

inginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya.”¹

Seperti telah dikemukakan, praktek-praktek dalam kehidupan politik dan kenegaraan yang memberikan citra negatif dalam pandangan masyarakat dan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang politik, mungkin disebabkan karena selama ini belum ada gambaran yang jelas tentang sistem politik ideal yang kita inginkan, dan bagaimana norma-norma operasional yang seharusnya diberlakukan dalam kerangka sistem tersebut. Yang ada barulah suatu konsep yang bersifat umum yang membuka peluang bagi golongan-golongan masyarakat untuk memberikan interpretasi sendiri yang cenderung mengutamakan kepentingan golongan dan bukan kepentingan bangsa dan negara.

Perdebatan yang terjadi beberapa tahun yang lalu di sekitar ada tidaknya ”kultur oposisi” dalam sistem demokrasi Pancasila, masalah fungsi kritik dan cara-cara penyampaiannya, masalah membanjirnya delegasi-delegasi maupun kelompok-kelompok dan perorangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Pusat untuk menyampaikan secara langsung berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dan terakhir permasalahan di sekitar pelaksanaan kampanye dalam rangka Pemilu 1982, semuanya dapat dipandang sebagai indikasi masih belum jelasnya beberapa aspek dari sistem politik ideal yang kita bangun.

Bidang politik memang merupakan salah satu bidang yang masih dalam proses pembangunannya sejalan dengan usaha pembangunan nasional, sehingga pendidikan politik harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan politik, seperti tampak dalam GBHN. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan politik tidak hanya tergantung pada pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri tetapi akan tergantung pula dari usaha-usaha yang lain dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan guna memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam GBHN.

Aspek-aspek seperti mekanisme demokrasi Pancasila, pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, pemantapan fungsi dan interaksi antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semuanya itu perlu ditangani secara simultan dalam pem-

¹ Alfian: *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 236.

bangunan bidang politik. Dengan demikian sistem politik Pancasila atau sistem politik ideal yang hendak kita wujudkan itu menjadi jelas, bagaimana ia harus diwujudkan dalam praktek kehidupan kenegaraan kita. Secara demikian kita juga akan mempunyai semacam ukuran yang baku untuk menilai apakah realita yang ada sekarang sesuai atau tidak dengan yang ideal atau yang seharusnya.

Masalah lain yang bersangkutan dengan pertanyaan apakah pendidikan politik itu masih diperlukan mengingat bahwa dalam masyarakat dengan sendirinya berlaku proses sosialisasi politik sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Sebenarnya memang terdapat kesejajaran antara proses sosialisasi politik yang terjadi dalam masyarakat melalui antar hubungan dalam kehidupan masyarakat dengan proses sosialisasi politik yang secara sadar dilakukan melalui pendidikan politik.

Kedua-duanya merupakan proses penyampaian nilai-nilai dan norma-norma kehidupan politik yang akan menumbuhkan sikap politik dan perilaku politik anggota masyarakat sebagai warga negara. Namun demikian memang bisa terjadi ketidaksejajaran mengingat pengaruh berbagai aspirasi politik golongan dan perorangan dalam masyarakat yang bisa tidak sesuai atau bahkan mungkin bertentangan dengan nilai yang secara nasional kita terima sebagai nilai yang benar.

Ini tentu tidak berarti bahwa dalam usaha memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila tidak dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Hak untuk berbeda pendapat umumnya diterima sebagai salah satu ciri kehidupan demokrasi, sehingga perbedaan pendapat tentu juga harus dimungkinkan dalam sistem demokrasi Pancasila. Yang terpenting ialah perlunya kesadaran bahwa konsep dan persepsi kita tentang demokrasi memang tidak tepat sama dengan konsep bangsa lain tentang demokrasi, meskipun esensinya yang pokok yang tidak lain adalah pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia adalah juga esensi demokrasi Pancasila. Bahkan di dalam demokrasi Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu nilai yang menjiwoinya. Perbedaan pendapat, bahkan konflik tentu bisa terjadi dan harus mendapatkan akomodasi, tetapi hal itu tentu tidak dapat ditolerir apabila sampai membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang pada gilirannya juga menggoyahkan nilai-nilai dasar itu sendiri dalam mana kita hidup sebagai bangsa dan mengatur kehidupan kita dalam bernegara bangsa. Jadi masalahnya memang perlu diciptakannya mekanisme yang mengatur sehingga perbedaan pendapat ataupun konflik itu tidak sampai merugikan dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan

pendapat harus dijaga agar tetap dalam jalur Pancasila dan ini akan terwujud apabila nilai-nilai dasar itu benar-benar hidup dalam dan dihayati oleh masyarakat serta terus dilestarikan. Menghayati mengandung arti yang lebih luas dari sekedar mengerti. Nilai-nilai itu perlu dimengerti dan diterima sehingga menjadi "milik" yang tanpa disadari pun tetap bekerja pada diri seseorang dan dengan sendirinya juga terwujud dalam sikap dan tingkah laku.

Untuk mencapai taraf penghayatan seperti itu tentu memerlukan proses yang umumnya adalah proses pendidikan dan "latihan" dalam proses mana orang menjadi lebih terbuka, menerima dan "terlatih" untuk mewujudkannya secara praktis. Itulah perlunya pendidikan politik sebagai suatu usaha sadar untuk mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma dasar khususnya dalam kehidupan politik dan kenegaraan.

Pendidikan politik dengan demikian harus mampu memberikan pengertian dan menumbuhkan sikap menerima akan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan kenegaraan dalam sistem politik Pancasila, sekaligus juga mampu memberikan "ketrampilan" tertentu yang bersifat praktis dalam kehidupan kenegaraan dalam kerangka sistem tersebut. Dengan perkataan lain aspek-aspek pengertian dan pemahaman, tanggap dan menerima serta pelaksanaan secara praktis sebagaimana dikenal dalam proses pendidikan pada umumnya harus terkandung juga dalam pendidikan politik. Hal ini tentu berkaitan dengan materi pendidikan politik serta cara dan metode yang dipergunakan dalam pelaksanaannya.

Nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan politik dan kenegaraan itu, yaitu nilai-nilai Pancasila, melalui pendidikan politik harus dapat dimengerti secara rasional, untuk selanjutnya dapat diterima secara emosional, dan terwujud dalam sikap dan tingkah laku dalam praktek hidup di masyarakat. Di sini jelas bahwa proses penanaman kesadaran seperti dimaksud tidak cukup dilakukan hanya dengan cara "mendengar", tetapi memerlukan juga pengamatan dan pengalaman praktis. Contoh dan keteladanan, pengalaman serta suasana lingkungan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Itulah sebabnya mengapa, seperti telah dikemukakan di muka, usaha-usaha lain dalam rangka pembangunan politik akan besar peranan dan pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan pendidikan politik.

PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, yang mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penting bagi seluruh

rakyat, seluruh warga negara. Oleh karena itu Garis-garis Besar Haluan Negara juga menunjuk pada pendidikan politik rakyat, yang perlu ditingkatkan agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Sementara itu kita juga menyadari pentingnya generasi muda bagi sesuatu bangsa karena generasi muda itulah yang dari masa ke masa akan meneruskan cita-cita bangsa. Secara alamiah generasi yang satu akan digantikan oleh generasi berikutnya, tetapi sementara terjadi penggantian generasi nilai-nilai dasar yang menjiwai dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah tetap dijaga kelestariannya, tetap berlaku sebagai nilai vital dan tetap dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa sepanjang masa.

Dalam kerangka itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap generasi untuk mempersiapkan generasi berikutnya sedini mungkin agar pada saatnya generasi berikutnya benar-benar siap mengambil alih dan meneruskan tugas serta peranan generasi sebelumnya dan secara demikian terjaminlah kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dari masa ke masa. Di sini berlaku semacam estafet, dalam mana tongkat estafet yang sama secara berkesinambungan disampaikan dan diterima oleh generasi sebelumnya ke generasi berikutnya menuju terwujudnya cita-cita bersama.

Sebagaimana kita ketahui, Pancasila adalah suatu rumusan falsafah yang kita jadikan dasar negara. Ia sekaligus adalah juga rumusan dari cita-cita bangsa yang memberikan arah ke mana kita harus menuju, yang sebagian secara eksplisit terumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara itu kita juga menyadari bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut akan merupakan proses yang panjang yang meliputi kurun waktu beberapa generasi. Usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut juga harus dilakukan dalam suatu kerangka sistem politik yang sesuai, dalam hal ini sistem politik Pancasila.

Oleh karena itulah meskipun pendidikan politik baik yang dilakukan secara sadar maupun yang dengan sendirinya berjalan dalam interaksi sosial dalam masyarakat, penting bagi seluruh rakyat, perhatian khusus terhadap generasi muda adalah wajar. Pelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam konsideran Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982, yang pada hakikatnya merupakan inti pendidikan politik, terutama memang harus diusahakan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda. Karena kunci masa depan ada di tangan generasi muda, penerus cita-cita bangsa.

Sebagai penerus cita-cita bangsa tentu generasi muda sudah seharusnya menghayati cita-cita tersebut melalui penghayatan nilai-nilai yang mendasari cita-cita tersebut, serta mengetahui norma-norma operasional, tata cara dan aturan permainan dalam kerangka sistem kehidupan politik guna mencapai dan mewujudkannya.

Politik dalam kerangka pengertian ini, yaitu sebagai sistem kehidupan kenegaraan guna mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa, menjadi kepentingan seluruh bangsa dan dengan demikian melibatkan semua warga negara. Ia tidak seharusnya dihindari tetapi sebaliknya perlu dimengerti dan dihayati oleh setiap warga negara dan dengan pengertian dan penghayatan tersebut memberikan partisipasinya. Partisipasi rakyat dalam kehidupan kenegaraan merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahkan pada hakikatnya merupakan panggilan suci untuk ikut serta dalam usaha mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa, yang tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan umum dalam arti material dan spiritual.

Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak usia muda dan makin meningkat dan mendalam sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kedewasaan seseorang. Dengan perkataan lain pendidikan politik guna menciptakan warga negara yang baik, yang sadar akan hak-hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan kenegaraan dalam rangka memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa harus dimulai sejak seorang anak mulai bisa mengerti dan memahami hal-hal yang sepintas lalu tampak sederhana tetapi sebenarnya memiliki makna besar dalam proses penanaman kesadaran bernegara bangsa. Lagu kebangsaan, bendera nasional, lambang negara, presiden, wakil presiden dan tokoh-tokoh nasional lainnya sudah dapat diperkenalkan kepada anak-anak kelompok usia pra-sekolah, meskipun baru sekedar mengenal tanpa mengerti maknanya yang sebenarnya dalam kehidupan kenegaraan. Pengenalan ini dalam proses selanjutnya akan lebih diperkaya, dipahami dan dimengerti secara lebih mendalam untuk selanjutnya dihayati dan dimanifestasikan dalam perilaku dalam praktek hidup sehari-hari.

Satu hal yang sekali lagi perlu ditekankan di sini ialah bahwa contoh dan keteladanan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan yang ditujukan tidak saja ke arah pengertian, tetapi lebih dari itu juga diarahkan kepada pendalaman dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan tingkah laku. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan melalui proses belajar mengajar di kelas atau bentuk-bentuk penataran adalah penting tetapi kiranya perlu disadari bahwa hal itu hanyalah merupakan salah satu cara atau metode, itupun hanya akan memberikan hasil yang optimal apabila si pengajar atau penatar sekaligus mampu memberikan contoh dan keteladanan.

Masih cukup banyak cara-cara lain yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk melaksanakan pendidikan politik, baik pada jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan sehari-hari, organisasi-organisasi sosial kepemudaan, media komunikasi massa, semuanya itu merupakan jalur-jalur dan sarana yang secara efektif dapat dipergunakan dan dimanfaatkan guna melaksanakan pendidikan politik rakyat, khususnya bagi generasi muda.

Dari sini kiranya jelas bahwa pendidikan politik bukanlah monopoli pemerintah. Dari pihak pemerintah pun kiranya juga tidak bermaksud demikian, karena tanpa pengaturan dan campur tangan pemerintah pun pendidikan politik sebagai proses sosialisasi nilai-nilai akan tetap berjalan melalui interaksi-interaksi dalam kehidupan kemasyarakatan. Bahwa pemerintah mengambil prakarsa untuk lebih menggiatkan dan meningkatkan serta mengarahkan proses tersebut adalah pada tempatnya baik karena alasan-alasan formal maupun praktis.

Masalah yang paling pokok ialah bagaimana nilai-nilai dasar yang luhur yang melandasi kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan kita itu tertanam secara dalam pada diri setiap warga negara Indonesia dan terwujud dalam sikap dan tingkah laku dalam praktek hidup bernegara bangsa. Dalam hal ini memang diperlukan adanya kesatuan bahasa dari setiap pihak yang terlibat atau melibatkan diri dalam proses pendidikan politik. Itulah perlunya adanya suatu pola dasar pendidikan politik yang menjadi kerangka acuan pokok dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik, sehingga baik instansi-instansi pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pendidikan politik berpegang pada sumber yang sama.

KESIMPULAN

Bidang politik merupakan salah satu bidang kehidupan bangsa yang perlu dibangun secara terus-menerus dalam rangka lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan kita. Setiap warga negara seyogyanya mengerti, menyadari dan meresapi cita-cita politik kita dalam bernegara bangsa, ikut-berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan menurut norma-norma yang berlaku dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam rangka itulah pendidikan politik perlu, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi praktis bagi setiap warga negara, karena apa yang ingin dicapai

dengan pendidikan politik pada hakikatnya secara sederhana dapat dirumuskan dengan "menjadikan warga negara sebagai warga negara yang baik."

Dalam kerangka pengertian ini seorang warga negara yang baik ialah warga negara yang mengerti, meresapi, mendalami dan menerima atau menghayati nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan asas hidup kemasyarakatan dan kenegaraan dari bangsanya, sekaligus mengerti dan menghayati norma-norma operasional serta sistem organisasi politik yang berlaku. Dengan pengertian dan penghayatan akan hal-hal tersebut diharapkan bahwa setiap warga negara akan bertingkah laku politik secara positif dalam rangka partisipasinya sebagai warga negara dalam kehidupan kenegaraan dalam kerangka sistem yang berlaku, yaitu sistem demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang berasaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena itu pendidikan politik pada tempat pertama adalah upaya guna lebih memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila untuk lebih dimengerti dan dihayati dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun kehidupan kenegaraan adalah juga masalah praktis, karena ia bersangkutan dengan implementasi nilai-nilai dalam praktek hidup kenegaraan. Pendidikan politik hanya akan berhasil baik apabila generasi muda dan masyarakat pada umumnya secara nyata melihat adanya praktek hidup kenegaraan yang sesuai dan tidak menyimpang dari nilai-nilai ideal yang mereka terima melalui pendidikan politik maupun melalui proses sosialisasi dalam interaksi sosial.

Itulah sebabnya mengapa pendidikan politik harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan politik. Pemantapan norma-norma operasional dan mekanisme demokrasi Pancasila, pemantapan kehidupan konstitusional, fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga kenegaraan dan interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut serta tegaknya hukum, semuanya itu harus terus-menerus diusahakan dalam rangka pembangunan politik dan kehidupan kenegaraan kita.

Kelemahan-kelemahan dalam aspek-aspek praktis dan pelaksanaan akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan politik, bahkan lebih jauh dari itu akan memberikan peluang bagi timbulnya usaha-usaha yang bertentangan dengan tujuan pendidikan politik. Usaha-usaha negatif demikian harus dicegah, dan pencegahan yang paling efektif kiranya dengan lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila melalui usaha pembangunan bidang politik.

Proses ini masih berjalan dan akan tetap berjalan secara meningkat karena seperti di muka telah disinggung pembangunan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan tidak mengenal titik akhir, lebih-lebih bagi kita pembangunan adalah juga merupakan pengamalan Pancasila.